

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Agustino, Leo, *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Widya Padjadjaran, Bandung, 2011.
- Chaidir, Ellydar, dkk, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2010.
- Farida Indrati S, Maria, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Gultom, Lodewijk, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia (suatu Kajian Dari Aspek Tugas dan Wewenangnya)*, CV. Utomo, Bandung, 2007.
- H. Bruggink, JJ, *Refleksi Tentang Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Kansil, CST, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, IKAPI, Jakarta, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Martosowignjo, Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1997.
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VIII Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010.
- Soebechi, H. Imam, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soelanto, Soerjono, dkk, *Perihal Kaidah Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Statsky, Wiliam, *West's Legal Thesaurus/Dictionary: A resource for the writer and the Computer Researcher*, West Publishing, St.Paul, 1985.

Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

### **Jurnal**

*Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. iv.

Siahaan, Maruarar, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum No.3 Vol, 16 Juli 2009, Hlm. 358.

### **Karya Ilmiah**

Asy'ari, Syukri, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara*, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2013.

Mahrus Ali, Mohammad, dkk, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasidan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

Sudrajat, Agung, *Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Pada Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Proses Legislasi Di Indonesia*, (SKRIPSI) Universitas Indonesia, Depok, 2012.

## **Makalah**

Duswara, H. Dudu, Mahmudin, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang (Masalah Dan Tantangannya)*, Makalah yang disampaikan pada Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh APHAMK bekerjasama dengan HSF, Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Jember Tanggal 8-10 Maret 2013 di Hotel Equator, Surabaya, Hlm. 3

Ekatjahjana, Widodo, *Pengujian Produk Hukum di Indonesia : Tinjauan Tentang Problem Pengujian dan Tantangan untuk Mewujudkan Kesatuan Lembaga Pengujiannya*, Makalah yang disampaikan pada Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh APHAMK bekerjasama dengan HSF, Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Jember Tanggal 8-10 Maret 2013 di Hotel Equator, Surabaya. Hlm. 1.

Materi yang disampaikan dalam Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh APHAMK bekerjasama dengan HSF, Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Jember Tanggal 8-10 Maret 2013 di Hotel Equator, Surabaya.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

### **Internet**

<http://jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia>, diakses pada tanggal 20 September 2017 Pukul 21.15

<http://news.liputan6.com/read/2221693/korupsi-dana-hibah-berjamaah-orang-dekat-atut-didakwa-7-tahun>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 15.00

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13415#.WjLuF3TLjB9>. diakses pada tanggal 12 Desember 2017 Pukul 12.00

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/35.%20BMK%20Edisi%20Februari%202012%20.pdf>, diakses pada tanggal 5 Desember 2017 Pukul 23.40

Mahendra, A.A. Oka, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, [http://www.djpp.kemenkumham.go.id/files/doc/432\\_oka%20mahendra.pdf](http://www.djpp.kemenkumham.go.id/files/doc/432_oka%20mahendra.pdf), diakses pada tanggal 19 Oktober 2017 Pukul 20.05

MD, Mahfud, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara”, Makalah, [http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah\\_21.pdf](http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_21.pdf), diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 17.20